

SKRIPSI

**PROFESIONALITAS PENGELOLA PELABUHAN PENYEBERANGAN
FERRY DI PAMATATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Oleh

NUR HIDAYATUL FITRI

Nomor Induk Mahasiswa: 10561120819

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

**PROFESIONALITAS PENGELOLA PELABUHAN PENYEBERANGAN
FERRY DI PAMATATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

NUR HIDAYATUL FITRI

Nomor Induk Mahasiswa: 105611120819

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Profesionalitas Pengelola Pelabuhan
Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten
Kepulauan Selayar

Nama Mahasiswa : Nur Hidayatul Fitri

Nomor Induk Mahasiswa : 105611120819

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jaelan Usman, M.Si


Dr. Abdi, M.Pd

Mengetahui :

Delcan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:0174/SP/IA.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa 15 Agustus tahun 2023.

MENGETAHUI:

KETUA

SEKRETARIS


Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Andi Luthur Prianto, S.I.P., M.Si

NBM : 730727

NBM : 492797

TIM PENGUJI

1. Dr. Jaelani Usman, M.Si (Ketua)
2. Dr. Hj. Sudarni, M.Si
3. Wardah, S.Sos., M.A
4. Hardianto Hawing, S.T., M.A





HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Hidayatul Fitri

Nomor Induk Mahasiswa : 105611120819

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Nur Hidayatul Fitri



ABSTRAK

Nur Hidayatul Fitri, Jaelan Usman, Abdi. Professionalism of Ferry Crossing Port Managers in Pamatata, Selayar Islands Regency

This type of research is basically a scientific way to obtain data with specific purposes and uses. To achieve this goal, a method is needed that is relevant to the goal to be achieved. This type of research uses a qualitative research type with a descriptive type that focuses on the professionalism of the ferry port manager in Pamatata, Selayar Islands Regency. The results of this research are planning the management of the ferry crossing port in Pamatata, Selayar Islands Regency, with the aim of providing better and more organized crossing services. Basically, organizing port management is not only related to regulations that are national in nature, but also closely related to various regulations and conventions that are regional and international. Actuating that the current implementation of port management is the core of the problem which is reduced to a conflict of interest. (Controlling) Implementation of supervision must have standards that are determined in order to minimize or prevent errors or omissions in the sense of standards

Keywords: *professionalism, manager, harbor, crossing, ferry*



ABSTRAK

Nur Hidayatul Fitri, Jaelan Usman, Abdi. Profesionalitas Pengelola Pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar

Jenis penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yang berfokus kepada profesionalitas pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan (*Planning*) perencanaan pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan dengan tujuan peyanaan penyebrangan yang lebih baik dan tertata. Pengorganisasian (*Organizing*) pengelolaan pelabuhan padadasarnya, tidak hanya berkaitan dengan regulasi yang sifatnya nasional, akan tetapi juga sangat berkaitan dengan berbagai regulasi dan konvensi yang bersifat regional, internasional. Pelaksanaan (*Actuating*) bahwa pelaksanaan pengelolaan pelabuhan saat ini adalah inti persoalan yang direduksi menjadi konflik kepentingan. (*Controlling*) Pelaksanaan pengawasan harus ada standar yang ditentukan agar dapat meminimalisir atau mencegah adanya kesalahan-kesalahan atau kelalaian dalam artian standar

Kata kunci: *Profesionalitas, pengelola, pelabuhan, Penyeberangan, Ferry*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang tak terhingga dan nikmatnya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Profesionalitas Pengelola Pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dorongan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada, Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Patta Parang dan Ibunda Andi Parang sebagai motivator yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan memberikan semangat serta dukungan moril tanpa henti kepada penulis untuk selalu optimis dalam menjalani aktivitas perkuliahan.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Wahid, S.Sos.,M.SI selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Abdi, M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Para dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Terima kasih kepada bapak kepala dinas perhubungan Drs. Suardi telah memberikan informasi
7. Terima kasih kepada bapak Syamsul Gadir, A.MD selaku kepala Pelabuhan atas informasi yang diberikan
8. Terima kasih kepada bapak M.Reza Pahlevi PB selaku Syahbandar atas waktunya memberikan informasi kepada penulis
9. Kepada seluruh informan saya ucapkan banyak terimakasih karena telah memabntu menulis dalam meberikan informasi
10. Kepada seluruh sodara saya Parmawati, Sirajuddin, Andi Sutriyanti, dan Nurul Azizah terima kasih yang takterhingga karena sudah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis

11. Serta semua keluarga, sahabat, teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

12. Untuk Bangtan Sonyeondan (BTS).Kim Namjoon,Kim Seokjin,Min Yoongi,Jung Hoseok,Park Jimin,Kim Taehyung,Jeon Jungkook yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodbooster disaat peneliti Lelah,serta menjadi inspirasi saat peneliti mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

Makassar, 22 Agustus 2023

Yang menyatakan

Nur Hidayatul Fitri



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori.....	14
C. Kerangka Pikir	35
D. Fokus Penelitian	36
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data.....	40
F. Keabsaha Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	42
B. Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan.....	66

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 data arus barang	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4.1 Penberangan	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan, menurut Pasal 1 UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu, di mana berlangsung kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Kegiatan-kegiatan menyangkut kapal-kapal yang bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang, fasilitas keselamatan pelayaran, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum yang melayani penyeberangan antara pulau. Pelabuhan penyeberangan merupakan pelabuhan umum yang sangat vital menggerakkan roda ekonomi Indonesia secara umum. Pelabuhan penyeberangan sebagai pintu gerbang jalur lintas penghubung darat antara Pulau. Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) merupakan unit kerja yang berlokasi di pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan komersil. Otoritas Pelabuhan Penyeberangan bekerja sama dengan PT. ASDP Indonesia Ferry sebagai pengelola pelabuhan penyeberangan, Syahbandar, Bea cukai, imigrasi, kesehatan pelabuhan dan Karantina (Lapu, 2022).

Angkutan penyeberangan adalah salah satu bentuk sistem transportasi yang diperlukan untuk menjangkau daerah-daerah yang dibatasi oleh sungai, laut, selat, maupun teluk. Dengan adanya angkutan ini diharapkan dapat

dipenuhi kebutuhan transportasi antar daerah yang menunjang pembangunan/ perkembangan wilayah tersebut (Hutasoit, 2020).

Menurut keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut, Kinerja pelayanan operasional adalah hasil kerja terukur yang dicapai pelabuhan dalam melaksanakan kegiatan operasional yang meliputi kinerja pelayanan kapal, kinerja pelayanan bongkar muat barang dan kinerja pelayanan utilitasasi fasilitas dan alat (Redita et al., 2020).

Pengelolaan pelabuhan, merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang 'kaya' dan sistematis. Secara umum, masalah pelabuhan ini hanya diatur dalam aturan Pelayaran, yaitu Undang-undang tentang Pelayaran No. 21 Tahun 1992. Sedangkan yang khusus mengenai pengelolaan pelabuhan baru diatur oleh peraturan setingkat Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001).

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-peroses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan.

Pelabuhan penyebrangan Pamatata adalah pelabuhan yang terletak di desa Pamatata Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar,

Provinsi Sulawesi Selatan. Pelabuhan Pamatata berada pada koordinat 50 – 49' – 24' Lintang Selatan dan 1200 – 31' – 28' Bujur Timur. Pelabuhan Pamatata merupakan pintu gerbang utama memasuki daratan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan jika melalui jalur laut dengan fasilitas penyebrangan berupa kapal ferry (Lapu, 2022)

Pelabuhan pamatata merupakan urat nadi penghubung antara daratan Sulawesi Selatan dengan Kepulauan Selayar dalam menunjang kelancaran komunikasi bagi perkembangan bidang ekonomi, sosial politik, budaya dan pertahanan keamanan dimana perkembangan dari tahun ketahun dirasakan semakin meningkat dan melahirkan suatu kebutuhan akan sarana yang dapat menunjang dampak pertumbuhan transportasi. Seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah tersebut dalam hal konektivitas, pemerataan kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi mendorong terjadinya peningkatan permintaan jasa transportasi dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data arus barang dan kunjungan kapal di Pelabuhan Pamatata, dijelaskan bahwa pertumbuhan untuk kunjungan kapal sebesar - 4.91%, serta untuk pertumbuhan penumpang sebesar 0,121% selama lima tahun terakhir. Peningkatan volume penumpang dari tahun ke tahun kian meningkat khususnya di hari libur.

Peningkatan volume penumpang pada pelabuhan Pamatata disetiap tahunnya mendorong perusahaan pelayaran untuk menambah satu unit armada sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal.

Tabel 1.1 Data arus barang dan kunjungan kapal di Pelabuhan Penyeberangan Pamatata

No.	Tahun	Kunjungan Kapal	Penumpang
		Unit	Orang
1	2019	1569	42975
2	2020	846	21880
3	2021	1190	46053
4	2022	1710	61494

Sumber : ASDP Cabang Selayar

Berdasarkan tabel 1.1 mengetahui bahwa arus penumpang umum mengalami pertumbuhan, dimana peningkatannya cukup signifikan. Dalam mewujudkan pengelola yang profesional khususnya bagi Pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar. Pengelola suatu yang berhubungan dengan implementasi yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelola menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.

Pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten kepulauan Selayar yang diberikan petugas pelabuhan, kenyamanan serta keamanan penumpang dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan serta harapan penumpang agar pelayanan yang ada dapat memberikan kepuasan penumpang. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, maka fungsi dermaga Pelabuhan Pamatata harus berjalan sesuai fungsi dan perannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Profesionalitas Pengelola Pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Bagaimana pengorganisasian pengelola pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar?
3. Bagaimana pelaksanaan pengelola pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar?
4. Bagaimana pengawasan pengelola pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengorganisasian pengelola pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengelola pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pengelola pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pikiran bagi perkembangan ilmu administrasi negara khususnya dalam bidang profesionalitas pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dipakai sebagai masukan kepada pihak pengelola Pelabuhan Pamatata dalam perencanaan dan pengembangan pelabuhan. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian selanjutnya, khususnya bagi mereka yang ingin melakukan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Fernando, Marta (2019)	Peranan agen dalam pengelolaan pelabuhan ferry bandar bentan telani di Bintan Kepulauan Riau	Memperhatikan tingginya kunjungan wisatawan ke Singapura yang tercatat kurang lebih ratusan ribu setiap tahunnya, demikian juga jika dilihat dari kedekatan geografis antara Singapura dengan Bintan atau Kepulauan Riau yang dapat ditempuh dalam waktu relatif 1 jam, maka dapat kita lihat bahwa transportasi laut merupakan sarana yang ideal. untuk memudahkan kunjungan wisatawan. Dengan mewujudkan kawasan Bintan resort ini sebagai tujuan wisata, maka kedua negara Republik Indonesia dan Singapura

			berkomitmen untuk menjadikan kawasan ini dapat dikunjungi dengan mudah oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik oleh karena itu kedua negara sepakat untuk membuat terminal ferry di wilayah negaranya masing-masing. Kata kunci: Pelabuhan Feri Internasional.
2	Akhmad Fahrul Islam, Imran Ismail, Husain Hamka (2022)	Pelayanan Publik PT. Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan Indonesia (Studi Kasus Pada Pelabuhan Penyeberangan Bira Kabupaten Bulukumba)	penyelenggaraan pelayanan publik pada penumpang kapal penyeberangan Bira di Kabupaten Bulukumba yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia masih memiliki ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan. Berdasarkan analisis SWOT diketahui bahwa kekuatan dari proses pelayanan publik ini memiliki kekuatan seperti satu-satunya pelabuhan penyeberangan menuju Kabupaten Kepulauan Selayar (pelabuhan tunggal), dikelola oleh BUMN, dan pelabuhan ini terletak di kawasan maritim dan kawasan wisata. Kelemahannya antara lain jarak pelabuhan yang jauh dari pusat kota, sistem pelayanan tiket yang dianggap kurang maksimal dan waktu tempuh pelayaran yang juga relatif lama. Dari segi peluang, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba diharapkan akan meningkat begitu pula dengan target peningkatan pelayanan publik yang juga diharapkan meningkat. Perbaikan fasilitas dan infrastruktur di kawasan sekitar kawasan pelabuhan juga diharapkan semakin membaik. Terakhir adalah

			ancaman, dimana penumpang diharapkan akan bergeser menggunakan pesawat menuju Selayar. Ancaman lainnya yakni <i>premanisme</i> dan percaloan
3	Rachmatika Lestari, Apri Rotin Djusfi, Phoenna Ath Thariq (2020)	Tinjauan yuridis Kewenangan pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan penyeberangan balohan sabang	Mengenai kewenangan pengelolaan pelabuhan pengumpan regional dalam konteks otonomi Khusus Aceh berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan PP No. 23 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh konteks otonomi khusus Aceh, tidak disebutkan secara rinci mengenai pengelolaan pelabuhan menurut jenis hierarkinya, akan tetapi hanya disebutkan mengenai pengelolaan pelabuhan (secara umum) dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikerjasamakan pengeloannya dengan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
4	Muhammad Ilhamsyah, (2018)	Strategi manajemen unit pelaksana teknis pelabuhan dan Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (UPT P2SKP) pondokdadap Sendangbiru Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur	Rumusan strategi manajemen yang harus dilakukan oleh UPT P2SKP Pondokdadap adalah strategi S-O (Strength Opportunity). Strategi S-O merupakan strategi yang menggambarkan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap untuk mendapatkan peluang yang sebesar-besarnya. Strategi S-O disini yaitu menjaga kualitas mutu ikan agar nilai ekonomi ikan semakin tinggi sehingga dapat menarik investor, menciptakan pusat-pusat

			pertumbuhan usaha perikanan yang didukung dengan adanya fasilitas pelabuhan sehingga dapat membuka kesempatan peluang kerja, menambah petugas atau tenaga kerja, menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.
5	Agus Pamungkas Rismilia Putra (2021)	Optimalisasi sumber Daya manusia dalam mengelola manajemen transportasi laut di PT Pelabuhan Indonesia III Tanjung Emas Semarang	Menangani pelayanan operator terminal pelabuhan yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III Tanjung Emas Semarang sudah baik, mampu menyelesaikan pelayanan operator terminal yang digunakan untuk kapal sandar (labuh) serta pengurusan pada Instansi terkait dan dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun persamaan dan pembeda dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian (Fernando, Marta, 2019)

Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan pelabuhan ferry, jenis dan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian sebelumnya membahas mengenai peranan agen sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas mengenai peranan agen dan penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai profesionalitas sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai profesionalitas dan lokasi dalam penelitian sebelumnya di pelabuhan ferry bandar bentan telani di Bintan Kepulauan Riau sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Penelitian (Akhmad Fahrul Islam, Imran Ismail, Husain Hamka, 2022)

Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pelabuhan penyeberangan feri, jenis dan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai profesionalitas pengelola, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai profesionalitas pengelola dan penelitian sebelumnya membahas mengenai pelayanan publik, sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas mengenai pelayanan publik dan lokasi dalam penelitian sebelumnya di PT. ASDP (Persero) Cabang Bira Bulukumba, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Penelitian (Rachmatika Lestari, Apri Rotin Djusfi, Phoenna Ath Thariq, 2020)

Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan pelabuhan penyeberangan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada Jenis dan Metode yang digunakan, dalam penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan yuridis sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis dan metode kualitatif, penelitian sebelumnya membahas mengenai kewenangan dan pengembangan, sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas mengenai kewenangan, pengembangan dan lokasi dalam penelitian sebelumnya di pelabuhan ferry bandar bentan telani di Balohan Sabang sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Penelitian (Muhammad Ilhamsyah, 2018)

Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan pelabuhan penyeberangan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada Jenis dan Metode yang digunakan, dalam penelitian sebelumnya menggunakan deskriptif dengan cara survey sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis dan metode kualitatif, penelitian sebelumnya membahas mengenai strategi manajemen unit pelaksana teknis pelabuhan, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai profesionalitas dan lokasi dalam penelitian sebelumnya di (UPT P2SKP) Pondokdadap Sendangbiru Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Penelitian (Agus Pamungkas Rismilia Putra, 2021)

Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan pelabuhan penyeberangan, jenis dan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian sebelumnya membahas mengenai optimalisasi sumber daya manusia, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai profesionalitas dan lokasi dalam penelitian sebelumnya di PT Pelabuhan Indonesia III Tanjung Emas Semarang sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Konsep dan Teori

1. Profesionalitas

a. Pengertian Profesionalitas.

Salah satu hal yang perlu dikembangkan ialah memasyarakatkan mentalitas profesional. Suatu profesi dituntut untuk menunjukkan kualitas dan kompetensinya. Oleh karena itu, suatu profesi wartawan harus memiliki sikap profesionalitas yang salah satunya mematuhi kode etik wartawan, karena bukanlah pekerjaan yang menjadikan seseorang menjadi profesional, melainkan semangat dalam melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:897), profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya, atau profesional (Nasional, 2019).

Pendapat Gunawan yang dikutip oleh Alex Sobur (2001) dalam bukunya “Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani”, mendefinisikan profesionalisme merupakan usaha kelompok masyarakat untuk memperoleh pengawasan atas sumber daya yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu. Pendapat Alex Sobur (2001:82) dalam bukunya “*Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*”, mengemukakan bahwa profesionalisme berarti isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk meraih keberhasilan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan suatu sikap, tingkah laku, serta kemampuan untuk menunjukkan suatu kualitas dan kompetensi sebagai suatu profesi.

b. Karakteristik Profesionalisme

Berikut ini merupakan beberapa hal yang mencirikan suatu profesionalisme menurut para ahli:

Pendapat Sinamo yang dikutip oleh (Lapu, 2022), mengemukakan bahwa karakteristik seorang profesional adalah sebagai berikut:

- 1) Sikap Selalu Memberi yang Terbaik
- 2) Orientasi Memuaskan Pelanggan
- 3) Sikap Kerja Penuh Antusiasme dan Vitalitas
- 4) Budaya Belajar Sepanjang Hayat
- 5) Sikap Pengabdian Pada Nilai-nilai Profesi
- 6) Hubungan Cinta dengan Profesinya
- 7) Sikap Melayani yang Altruistik
- 8) Kompetensi Tinggi Berorientasi Kesempurnaan.

Pendapat Terence J. Johnson yang dikutip oleh Alex Sobur (2001:78) dalam bukunya “Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani”, mengemukakan bahwa ada enam kriteria profesional, yakni:

- a) Keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan teoretis
- b) Penyediaan pelatihan dan pendidikan
- c) Pengujian kemampuan anggota
- d) Organisasi

- e) Kepatuhan kepada suatu aturan main profesional
- f) Jasa pelayanan yang sifatnya altruistik

Pendapat Soetedjo (2003:34), mengemukakan bahwa seorang atau badan/lembaga disebut profesional apabila memenuhi tiga kriteria berikut, yaitu :

- 1) Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya, dan untuk badan/ suatu lembaga keahlian yang bersangkutan dengan profesinya harus tersedia secara memadai.
- 2) Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang bersangkutan,
- 3) Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau Etika profesi.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa karakteristik suatu profesionalisme adalah sebagai berikut:

- a) Dedikasi terhadap profesi untuk melayani kepentingan publik
 - 1) Mencintai Profesinya dan mengabdikan pada nilai-nilai Profesi
 - 2) Selalu memberi yang terbaik dan melaksanakan pekerjaan secara total
 - 3) Sikap melayani yang altruistik dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan
- b) Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya.
 - 1) Keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis

- 2) Pelatihan dan pendidikan
 - 3) Pengujian kemampuan calon anggota
 - 4) Budaya belajar sepanjang hayat
 - 5) Kompetensi tinggi berorientasi kesempurnaan
- c) Tertampung dalam organisasi
- 1) Berpartisipasi penuh dalam asosiasi
 - 2) Memahami visi dan misi organisasi profesi
 - 3) Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang bersangkutan,
 - 4) Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau Etika profesi.

2. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat (Apriani et al., 2021).

Menurut Nugroho (2003:119) dikutip oleh Muzwardi, (2016) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam

ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan (Adam & Dwiastuti, 2015).

Sementara Terry (2009:9) dikutip oleh Muzwardi, (2016) mengemukakan bahwa: Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen,

seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Lasse, 2016).

b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan (Purbani & Aisyah, 2019):

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut (Apriani et al., 2021):

- a) Menentukan strategi
- b) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f) Menentukan ukuran untuk menilai
- g) Mengadakan pertemuan
- h) Pelaksanaan.
- i) Mengadakan penilaian
- j) Mengadakan review secara berkala.
- k) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

c. Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam (Wahyudi et al., 2017) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli:

Menurut Henry Fayol (2002) mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian)

Commanding (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian)
Controlling (Pengawasan).

Sedangkan menurut George R. Terry (2006) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain: *Planning Organizing Actuating Controlling*, sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning Organizing Motivating Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.

Menurut Luther Gullick Fungsi Pengelolaan terbagi atas *Planning. Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budegeting*. Berikut adalah pengertian fungsi-fungsi Manajemen menurut para ahli:

- 1) *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan 2009:40). Koonts and Donnel dalam Hasibuan, *planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures, and programs*. Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan – kebijaksanaan, prosedur – prosedur, dan program – program dari alternatif – alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.
- 2) *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang

diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (Hasibuan). *Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objectives.* (Terry). Artinya: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

- 3) *Actuating, Directing and Leading* (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. (Hasibuan). *Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.* (Terry). Artinya: pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
- 4) *Controlling: Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans* (P. Strong). Artinya: pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu

perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. *Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished* (Koontz). Artinya: pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

- 5) *Staffing* atau *Assembling resources* adalah menentukan keperluan - keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. *Staffing* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi (Hasibuan).
- 6) *Motivating* (Motivasi) adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan (Hasibuan).
- 7) *Programming* adalah proses penyusunan suatu program yang sifatnya dinamis (Hasibuan).
- 8) *Budgeting* (Anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Jadi anggaran harus rasional (Hasibuan).

- 9) System adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya bekerja bersama sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama. Dimana dalam sebuah sistem bila terjadi satu bagian saja yang tidak bekerja atau rusak maka suatu tujuan bisa terjadi kesalahan hasilnya.
- 10) *Commanding* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
- 11) *Coordinating* (Koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan). Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:
- a) Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif
 - b) Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini
 - c) Pengarahan usaha-usaha ini.
- 12) *Evaluating* (penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya

dicapai. Ada beberapa hal yang penting yang diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa penilaian fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati/hidupnya suatu organisasi.
 - b) Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
 - c) Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.
- 13) *Reporting* (Laporan) dalam manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.
- 14) *Forecasting* (peramalan) adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan perkiraan/taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan.
- 15) *Facilitating*: Fungsi fasilitas meliputi pemberian fasilitas dalam arti luas yakni memberikan kesempatan kepada anak buah agar dapat berkembang ide-ide dari bawahan diakomodir dan kalau memungkinkan dikembangkan dan diberi ruang untuk dapat dilaksanakan.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.

d. Ciri-ciri Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan

kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Geroge R. Terry (2006:342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

- 1) Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

- 4) Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Tujuan perancangan adalah (Wahyudi et al., 2017):

- a) Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
- b) Memusatkan perhatian kepada sasaran
- c) Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
- d) Memudahkan pengawasan

Tujuan pengorganisasian adalah (Purbani & Aisyah, 2019):

- a) Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat
- b) Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.
- c) Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain.
- d) Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
- e) Memudahkan motivasi dan moral pekerja.

Tujuan penggerakan menurut George R. Terry (2006:364) adalah:

- a) Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
- b) Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
- c) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- d) Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
- e) Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

3. Pelabuhan

a. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah terdiri dari daratan dan perairan yang memiliki batas tertentu dan sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau tempat bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal dan memiliki fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan dan sebagai tempat pemindahan intra dan antarmoda transportasi. Sedangkan pengertian dari Kepelabuhanan sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan barang, keselamatan dan keamanan pelayaran dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah (Balfas, 2016).

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah (Lestari et al., 2020).

Pengertian Pelabuhan menurut para Ahli

- 1) Wahyu Agung Prihartanto (2014) menurutnya pelabuhan adalah suatu perairan yang sebagian tertutup dan terlindung terhadap angin dan gelombang, serta aman bagi kapal untuk berlabuh, mengisi bahan bakar, mengadakan perbaikan, dan pemindahan barang.
- 2) Edy Hidayat (2009) dalam Balfas, (2016) menyebutkan bahwa Pelabuhan menurut jenisnya dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a) Pelabuhan umum yaitu pelabuhan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum contoh : pelabuhan belawan di Sumatera Utara dan pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara.
 - b) Pelabuhan Khusus (Pelsus sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 terminologinya adalah tarsus/Terminal Khusus) yaitu pelabuhan yang dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, contoh pelabuhan milik pertamina, Pabrik semen gersik dan lain-lain.

Pelabuhan umum dapat dibedakan atas:

- 1) Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan (tidak mengutamakan Profit) dimana penyelenggaraannya adalah pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Satuan Kerja Pelabuhan.
- 2) Pelabuhan yang di usahakan (mengutamakan Profit) dimana penyelenggarannya adalah BUP (Badan Usaha Pelabuhan) yang saat ini menjadi PT. Pelabuhan Indonesia I,II,III, dan IV (persero).

Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batasan-batasan sebagaimana disebut diatas dalam “definisi Kepelabuhanan” (Hutasoit, 2020) terdiri dari:

- 1) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) yaitu meliputi daratan dan perairan yang menjadi wilayah pelabuhan.
- 2) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) yaitu perairan disekeliling DLKR Perairan.

Pada pengertian diatas dinyatakan aktivitas apa yang berlangsung dipelabuhan, fasilitas apa yang mendukung aktivias, serta apa tujuan yang hendak dicapai dari bagian aktivitas tersebut.

- 1) Unsur terpenting adalah tujuan penyelenggaraan, yakni:
 - a) Untuk menunjang safety, security, dan kualitas layanan bagi kapal, arus barang serta penumpang.
 - b) Mendorong pembangunan perekonomian nasional daerah.
- 2) Unsur penting kedua ialah aktivitas-aktivitas:

- a) Penegakan disertai penindakan hukum sesuai peraturan perundangundangan pelayaran dan perkapalan oleh institusi pemerintahan.
 - b) Menggerakkan dinamisasi roda bisnis atau pengusaha.
- 3) Unsur penting ketiga ialah fasilitas pelayanan aktivitas kepelabuhanan, yakni:
- a) Fasilitas pokok.
 - b) Fasilitas penunjang didaratan ataupun diperairan.

b. Peran pelabuhan

Dalam kedudukan pelabuhan sebagai sub sistem terhadap pelayaran, dan mengingat pelayaran sendiri adalah pembawa bendera mengikuti pola perdagangan *ship follows the trade*, maka pelabuhan menjadi salah satu unsur penentu terhadap aktivitas perdagangan. Maka peran pelabuhan yang dikelola secara efisien akan mendorong kemajuan perdagangan, bahkan industry daerah belakang akan maju dengan sendirinya. Pelabuhan menjadi pemicu bertumbuhnya jaringan jalan raya, jaringan rel kereta api, dan pergudangan tempat distribusi ataupun konsolidasi barang komoditas. Jaringan sarana dan prasarana moda transportasi darat menjadikan pelabuhan sebagai titik simpul intramoda transportasi darat dan antarmoda darat-laut (Lasse, 2016).

c. Fungsi pelabuhan

Menurut D.A Lasse (2016) mengatakan, bahwa fungsi pelabuhan adalah.

1) Gateway

Pelabuhan berfungsi sebagai pintu yang dilalui orang dan barang ke dalam maupun keluar pelabuhan yang bersangkutan. Disebut sebagai pintu karena pelabuhan adalah jalan atau resmi bagi lalu lintas barang perdagangan.

2) Link

Dari batasan pengertian yang telah dipaparkan, keberadaan pelabuhan hakikatnya memfasilitasi pemindahan barang muatan antar moda transportasi darat inland transport dan moda transportasi laut maritime mtransport menyalurkan barang masuk dan keluar masuk pabean secepat dan seefisien mungkin. Pelabuhan versi UNCTAD berfungsi sebagai mata rantai link yang menjadi penghubung rangkaian transportasi. Pada fungsinya link ini terdapat setidaknya tiga unsur penting, yakni: menyalurkan atau memindahkan barang muatan dari kapal ke truk, operasi pemindahan berlangsung cepat artinya minimum delay, efisien biaya.

3) Interface

Barang yang diangkut via maritime transport setidaknya melintasi area pelabuhan dua kali, yakni satu kali di pelabuhan muat dan satu kali di pelabuhan bongkar. Di pelabuhan muat demikian juga di pelabuhan bongkar dipindahkan dari atau ke sarana angkut dengan menggunakan berbagai fasilitas dan peralatan mekanis maupun non mekanis. Peralatan untuk memindahkan muatan menjembatani kapal dengan truk atau kereta

api atau truk atau kereta api dengan kapal. Pada kegiatan fungsi pelabuhan adalah antar muka interface.

4) Industrial entity

Fungsi pelabuhan yang diselenggarakan secara baik akan bertumbuh dan akan menyuburkan bidang usaha lain sehingga area pelabuhan menjadi zona industry terkait dengan kepelabuhanan.

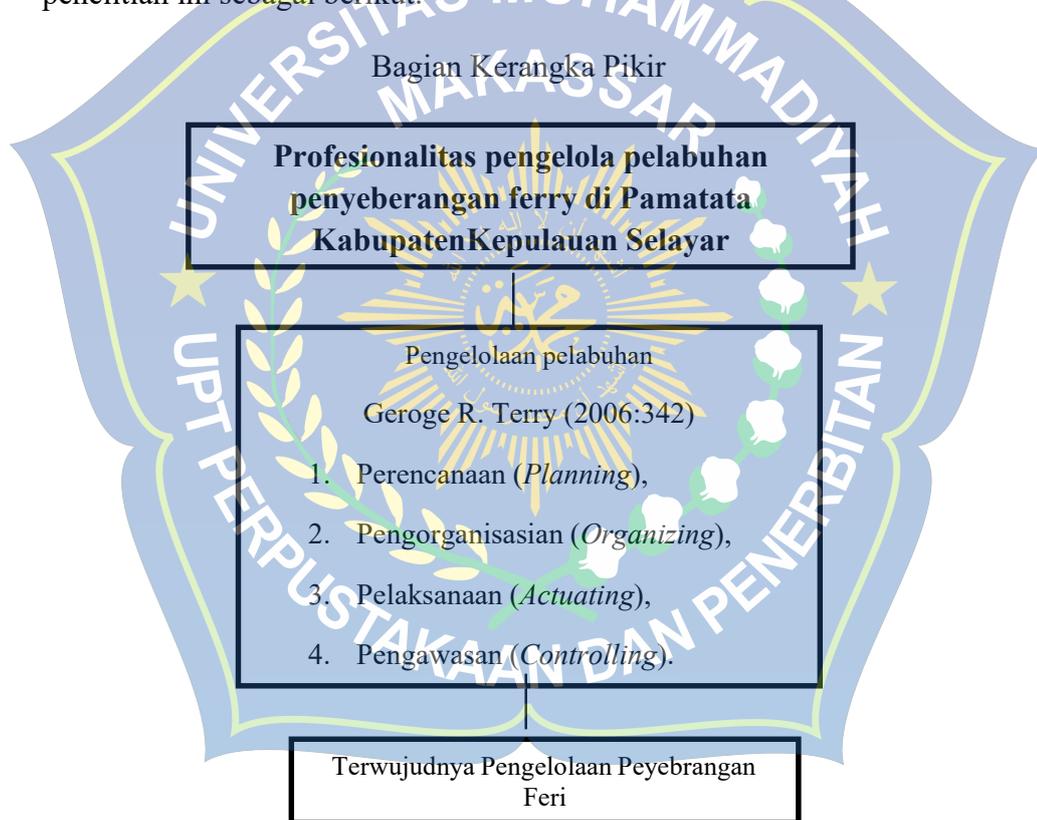
C. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka maka alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Sebuah kerangka pikir bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran.

Kerangka pikir dalam penelitian ini mengenai Manajemen pelabuhan penyeberangan ferry di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar diukur menggunakan indikator menurut Geroge R. Terry (2006:342) yaitu: 1) Perencanaan (*Planning*), 2) Pengorganisasian (*Organizing*), 3) Pelaksanaan (*Actuating*), 4) Pengawasan (*Controlling*).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka skema kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini yaitu tentang Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*) Pengawasan (*Controlling*)

E. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari penafsiran yang salah pada penelitian, maka deskripsi fokus dalam penelitian ini mengenai profesionalitas pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Suatu kegiatan untuk menetapkan tujuan apa yang akan dicapai dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Suatu kegiatan menentukan, membagi atau mengelompokkan pekerjaan diantara anggota kelompok organisasi dan memberikan kekuasaan untuk mencapai tujuan..

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Suatu kegiatan menggerakkan, mengarahkan hingga memotivasi anggota organisasi untuk melaksanakan tugasnya masing-masing guna mencapai tujuan..

4. Pengawasan (*Controlling*)

Suatu kegiatan pemeriksaan untuk menyesuaikan antara rencana-rencana yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian ini akan dilakukan selama \pm 2 bulan. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yang berfokus kepada profesionalitas pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar. Menurut Sugiyono (2014) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti (pewawancara) untuk memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:



Tabel 3.1 informan penelitian

no	Nama	Inisial	Pekerjaan
1	Drs. Suardi	SR	Kepala dinas Perhubungan
2	Syamsul Qadri,A.MD	SA	Kepala Pelabuhan
3	M.Reza Pahlevi PB		Kepala Syahbandar

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian sangat diperlukan teknik tertentu untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data secara langsung yang terkait dengan pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan dengan pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terencana tidak terstruktur. Yusuf (2014) mengemukakan bahwa wawancara terencana tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun

rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan obyek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut antara lain menyangkut profil pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Instrumen Utama (Peneliti)

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data langsung dari sumber data. Karena peneliti sebagai instrumen, maka peneliti harus sanggup menyesuaikan diri dan berinteraksi secara langsung dan tuntas dengan fenomena yang sedang dipelajari.

2. Instrumen Bantu (Pedoman Wawancara)

Instrumen bantu kedua ini berupa pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti sebagai alat bantu dalam pengambilan data secara langsung di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh (Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2014, p. 17).

Setelah data terkumpul dalam penelitian ini, dilakukan tiga prosedur yaitu dijelaskan sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan (membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta membuang yang tidak perlu dengan langkah-langkah yaitu: (1) memilih data yang dianggap penting, (2) membuat kategori data, (3) mengelompokkan data dalam kategori.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2014:17). Proses mendapatkan bukti-bukti tersebut yang disebut verifikasi data.

G. Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk menilai apakah data yang diperoleh di lapangan tersebut valid atau tidak. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2017), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan satu metode pengumpulan data terhadap beberapa sumber data (*multiple sources*)

Data hasil wawancara yang diperoleh dari satu informan dalam penelitian ini dibandingkan dengan data hasil wawancara dari informan lainnya kemudian dilihat kesesuaiannya. Apabila data hasil wawancara dari beberapa informan telah sesuai dengan kata lain tidak terjadi kontradiksi, maka data tersebut dianggap kredibel atau valid.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Letak Geografis kabupaten kepulauan selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 km² (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk sebanyak ±134.000 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan Benteng, Bontohara, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu, serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonereta, Pasimurannu, dan Pasilambena.

Dalam kitab hukum pelayaran dan perdagangan Amanna Gappa (abad 17), Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit baik untuk pelayaran menuju ke timur dan ke barat. Disebutkan dalam naskah itu bahwa bagi orang yang berlayar dari Makassar ke Selayar, Malaka, dan Johor, sewanya 6 rial dari tiap seratus orang. Belanda mulai memerintah Selayar pada tahun 1739. Selayar ditetapkan sebagai sebuah keresidenan dimana residen pertamanya adalah W. Coutsier (menjabat dari 1739-1743). Berturut-turut kemudian Selayar diperintah oleh orang Belanda sebanyak 87 residen atau yang setara dengan residen seperti Asisten

Resident, Gesagherbber, WD Resident, atau Controleur. Barulah Kepala pemerintahan ke 88 dijabat oleh orang Selayar, yakni Moehammad Oepoe Patta Boendoe. Saat itu telah masuk penjajahan Jepang sehingga jabatan residen telah berganti menjadi Guntjo Sodai, pada tahun 1942. Di zaman Kolonial Belanda, jabatan pemerintahan di bawah keresidenan adalah Reganschappen.

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5o42' - 7o35' Lintang Selatan dan 120o15' - 122o30' Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba disebelah utara, Laut Flores sebelah timur. Laut Flores sebelah selatan dan Selat Makassar di sebelah barat.

Sebelah Utara : Kabupaten Bulukumba

Sebelah Selatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Sebelah Timur : Laut Flores

Sebelah Barat : Laut Flores dan selat Makassar

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan memanjang dari utara ke selatan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 Km² yang terdiri 1,357,03 Km² daratan dan 9.146,66 Km² wilayah pengelolaan laut.

Pasimarannu 176,35, Pasilambena 102,99, Pasimasunggu 114,5, Taka Bonerate 221,07, Pasimasunggu Timur 47,93, Bontosikuyu 199,11, Bontoharu

129,75, Benteng 7,12, Bontomanai 115,56, Bontomatene 159,92, Buki 82,73.

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka BPS, 2011.

Ketenagakerjaan Penduduk usia kerja dapat didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun keatas, penduduk tersebut terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Agama Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar pada dasarnya merupakan masyarakat yang religius, beradat dan berbudaya,. Kabupaten Kepulauan Selayar adalah daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama islam dan kebanyakan berasal dari etnis Makassar yang masih mempertahankan tradisi, adat, dan keakraban. sejalan dengan hal tersebut maka tempat peribadatan bagi penganut agama islam terlihat jauh lebih banyak dari agama lain, sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah Masjid sebanyak 173 Unit, Mushollah 24 unit sehingga jumlah tempat ibadah untuk umat muslim sebanyak 197 unit. Sementara tempat ibadah umat nasrani masing-masing tercatat 68 unit gereja protestan, 5 unit gereja katolik, umat budha 2 Unit dan hindu 1 unit.

Tingkat pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya mengalami terselenggaranya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk sumberdaya manusia yang cerdas, profesional dan religius. "Peningkatan layanan pendidikan di semua 44 jenjang pendidikan adalah program utama sebagai jaminan terlaksananya proses pemerataan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengutamakan pembangunan pendidikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dicerminkan oleh berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan

sektor pendidikan. Peningkatan layanan Pendidikan di semua jenjang pendidikan, Peningkatan Kualitas guru, peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan, peningkatan kompetensi kelulusan. peningkatan kualitas layanan pendidikan nonformal dan informal, serta pembinaan pemuda dan olahraga.

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di akses melalui jalur udara dan darat. Terdapat dua maskapai penerbangan Nasional yang melayani rute ke selayar dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jalur darat dengan menumpang bus dari terminal malengkeri menuju Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya melanjutkan perjalanan laut dengan feri penyeberangan menuju pelabuhan Pamatata dan perjalanan darat menuju Kota Benteng. Aneka alat transportasi di kota Benteng dapat dijumpai. Seperti Mobil, becak, dan perahu. Mobil digunakan sebagai angkutan dalam kota dan antar kecamatan. Becak menjadi kendaraan 45 yang mudah di jumpai di setiap sudut kota. Kapal laut menjadi penghubung antar pulau

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 1, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Gambaran Umum Pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata

Gambar 4.1: penyeberangan



Sumber: dokumentasi peneliti

Pelabuhan penyeberangan Pamatata adalah pelabuhan yang terletak di desa Pamatata, kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pelabuhan ini merupakan pintu gerbang utama memasuki daratan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan jika melalui jalur laut dengan fasilitas penyeberangan berupa kapal feri. Menurut rencana pelabuhan ini akan disinggahi kapal yang berlayar dari arah wilayah timur menuju wilayah barat Indonesia, demikian juga sebaliknya. Perencanaan Kepulauan Selayar menjadi arus Timur-Barat Indonesia via laut, mengingatkan kita pada peta arus perdagangan kawasan kepulauan Nusantara beberapa abad yang lalu. Saat itu, Pulau Selayar menjadi pusat transit kapal-kapal saudagar dari berbagai penjuru. Hal itu ditandai dengan banyaknya situs barang antik di dasar laut di sekitar Kepulauan Selayar. Dan secara logika posisi Kepulauan Selayar memang sangat strategis menghubungkan timur dan barat, demikian juga wilayah utara dan selatan.

Pelabuhan penyeberangan Pamatata saat ini berfungsi sebagai pelabuhan transit kapal feri dengan rute pelayaran pelabuhan Bira - Pamatata - Pelabuhan penyeberangan Pattumbukang Takabonerate Pasimasunggu Timur - Pasilambena - NTT (Reog, Sikka). Untuk sementara, pelayaran itu direncanakan akan menggunakan kapal KMP. BALIBO dan KMP. BONTOHARU. Sementara jadwal pelayaran direncanakan 1 kali dalam seminggu, berangkat setiap hari Kamis. Mengingat kondisi perairan Selayar yang tergolong ganas, maka pelayaran akan ditunda jika cuaca tidak memungkinkan.

Secara geografis letak/posisi pelabuhan Pamatata berada pada $-50^{\circ} -49' -24''$ Lintang Selatan dan $-1200^{\circ} -31' -28''$ Bujur Timur, dengan batas-batas

wilayah yaitu sebagai berikut : a) Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Bone. b) Sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores. Lokasi Terminal 68 c) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores. d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bontomatene.

Dilihat dari kondisi terminal saat ini maka perlu pengembangan agar area terminal serta berbagai sarana penunjang lainnya seperti pergudangan, parkir dan lain-lain tidak lagi semrawut. Dengan demikian aktivitas bongkar muat pada pelabuhan dapat dipenuhi baik dari segi teknis maupun non teknis dengan tetap berpedoman pada Rencana Induk Kabupaten Kepulauan Selayar, Rencana Tata Guna Lahan serta Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar. Jika hal ini dilakukan maka area/lokasi terminal penyeberangan lama dapat difungsikan sebagai lokasi pergudangan terminal.

Menurut rencana, Dari Bira juga akan diadakan rute pelayaran tambahan yaitu Bira - Bau-Bau, Bira - Rawa Saban, Bira - Tuban, Bira - Karimunjawa, Bira - Pluan Laut, Bira - Ketapang - Dumai dengan kapal KMP. SANGKE PALLANGA. Jadwal keberangkatan dari Bira direncanakan 1 kali seminggu, setiap hari Selasa. Jadwal ini konon akan sering berubah sesuai kondisi serta keadaan penumpang yang akan berlayar ke tujuan tersebut. Dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar, pelabuhan ini biasa ditempuh dengan kurang lebih 1 jam perjalanan darat.

B. Hasil Penelitian

Kemampuan Pemerintah untuk meyakinkan masyarakat untuk merasakan dan melihat keamanan, keselamatan serta kenyamanan yang baik itu ditunjukkan dengan kemampuan petugas untuk menjawab pertanyaan (masyarakat pengguna jasa) calon penumpang, baik itu berupa peralatan yang mendukung pelayanan, dan peralatan untuk keselamatan dalam pelayaran, serta jadwal keberangkatan dan kedatangan speedboat, serta kenyamanan di pelabuhan.

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Moda transportasi air yang beroperasi di pelabuhan Pamatata merupakan angkutan penyeberangan hal ini merujuk pada Peraturan menteri perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. Penentuan standar pelayanan angkutan penyeberangan indikator yang dipergunakan mengacu kepada acuan normatif yaitu Peraturan menteri perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan.

Hal ini di sampaikan oleh informan Drs. Suardi selaku Kepala dinas Perhubungan menyampaikan bahwa:

“dalam proses penyeberangan dibutuhkan standar profesional dalam melakukan pelayanan agar masyarakat aman dan selamat sampai ditujuan dan dalam pengelolaan pelabuhan penyeberangan ini dibutuhkan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku” (hasil wawancara oleh informan SR pada tanggal 15 Juli 2023)

Hasil wawancara di atas Fasilitas utama atau pokok dan pendukung yang minimal dimiliki pelabuhan penyeberangan yang terkait dengan pelabuhan penyeberangan, dan untuk penunjang pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menjelaskan tentang Manajemen Pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan yang mengacu pada pustaka-pustaka sebelumnya Manajemen Pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar Penelitian menggunakan indikator Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*).

1. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Geroge R. Terry (2006) Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah, Anda harus memusatkan pikiran kepada apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Anda harus meramalkan sejauh mana

kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik dilihat dari aspek ekonomi, social, maupun lingkungan politik tempat organisasi berorganisasi serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut.

Agar kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan baik, sangat diperlukan adanya perencanaan. Sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, rencana yang harus dibuat adalah rencana kegiatan operasional yang harus dilakukan dalam satu periode untuk mencapai tujuan pengelola pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar. Perencanaan adalah bentuk kegiatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan serta dianggap perlu untuk mencapai hasil terbaik.

Lokasi objek pengelola pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada lokasi, terdapat kawasan permukiman yang terbentuk dan berkembang sejak lama dan terkesan kumuh. Karakteristik terbentuknya permukiman kumuh tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya pusat aktivitas berupa kegiatan pelabuhan fery dan juga letaknya di daerah pantai juga merupakan permukiman diatas air atau dalam wilayah area pasang surut sehingga dapat dikategorikan sebagaikawasan

kumuh area pasang surut dan permukiman kumuh dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.

Hal ini di sampaikan oleh informan Kepala Pelabuhan Syamsul Qadri,A.MD selaku Kepala Pelabuhan menyampaikan bahwa:

“ada beberapa rencana yang sudah kami susun yaitu ada beberapa hal yang diperhitungkan dalam merencanakan fasilitas untuk pelabuhan ini terdiri atas perencanaan dermaga, alur pelayanan, fasilitas tambat, dan bangunan pemecahan gelombang” (hasil wawancara oleh informan SQ pada tanggal 11 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Perencanaan pengelola pelabuhan Penyeberangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah, Anda harus memusatkan pikiran kepada apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan yang dilakukan oleh pihak pengelola pelabuhan yaitu penambahan Dermaga pada pelabuhan *ferry* ini hanya mampu ditambatkan oleh satu kapal saja. Sedangkan jumlah penumpang menurut statistik pada tahun 2009, kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan *ferry* ini terdapat 274.791 kendaraan yang datang dan 270.312 kendaraan yang tiba di pelabuhan untuk segala tipe kendaraan, artinya terdapat sekitar 1,514 kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan *ferry* ini rata-rata tiap harinya. Banyaknya jumlah kendaraan yang menggunakan jasa

penyebrangan *ferry* ini, dan tidak terakomodasinya kendaraan-kendaraan tersebut dikarenakan dimensi dermaga yang hanya mampu ditambatkan oleh satu kapal, membuat para penumpang dan pengendara harus menunggu dan antri berjam-jam agar dapat masuk ke kapal. Karenanya perlu dilakukan penambahan dimensi ataupun jumlah dermaga sehingga dapat melayani kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa penyebrangan ini dengan baik.

Hal ini di sampaikan oleh informan M.Reza Pahlavi PB selaku Syahbandar menjelaskan bahwa:

“untuk penyebrangan ini masih perlu di tingkatkan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan yang memuaskan adapun rencana kami yaitu lebih memperluas area peyebrangan ini dan menambah staf dan juga karyawan yang bekerja di pelabuhan pebrangan ini” (hasil wawancara oleh informan RP 12 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa Perusahaan Pelayaran akan mencoba untuk mengoperasikan kapal-kapal dengan ukuran besar untuk jarak pelayaran yang jauh dan kapal-kapal yang lebih kecil dioperasikan sebagai *ferry*. Sebagai tambahan, jumlah *ferry* yang cukup besar harus dipergunakan untuk menjamin frekuensi layanan yang baik. Untuk menjaga agar pelayanan tetap baik dan stabil para pemilik kapal juga harus mencoba untuk memastikan bahwa *ferry* yang dioperasikan adalah *ferry* dengan ukuran yang sama atau hamper sama khususnya untuk *route* jenis *Pendulum*.

Adapun rencanana yang dilakukan oleh pengelola pelabuhan peyebrangan *ferry* yaitu Terminal penumpang untuk keperluan menunggu sebelum keberangkatan kapal, perpindahan antar moda transportasi perairan

dengan angkutan jalan serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Penimbangan kendaraan bermuatan untuk mengendalikan kelebihan muatan, serta untuk mengetahui besar muatan yang diangkut oleh *ferry* Jalan penumpang keluar masuk kapal (*gang way*) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa seperti loket penjualan tiket. Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker) untuk keperluan kapal *ferry*. Instalasi air, listrik dan telekomunikasi. Fasilitas pemadam kebakaran. Serta tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal *ferry*.

Adapun hasil wawancara oleh informan selaku Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Selayar menyampaikan bahwa:

“dalam melakukan penyeberangan di usahan membentuk pelayanan dan baik dan untuk perencanaan kedepan kami akan melakukan pelayanan yang baik dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang dapat membantu masyarakat selama dalam penyeberangan agar masyarakat nyaman dan selamat sampai di tujuan” (Hasil wawancara oleh informan MN pada tanggal 13 Juni 2023)

Hal ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan dengan tujuan pelayanan penyeberangan yang lebih baik dan tertata. Untuk pelabuhan penyeberangan feri, direncanakan penambahan dimensi panjang, hal ini dilakukan untuk menjaga jarak dengan pelabuhan Pamatata yang terlalu dekat dan dapat mengganggu sirkulasi pelayaran untuk penyeberangan. pelabuhan penyeberangan feri yang panjang awalnya 50 meter, direncanakan untuk ditambah menjadi 70 meter, dengan jorokan mengarah kearah timur laut. Selain itu direncanakan juga perluasan dimensi

untuk *mooring* atau tempat bersandar dan menambatkan *speedboat*. Selain itu pada Pelabuhan juga dilengkapi dengan bangunan yang berfungsi sebagai ruang tunggu, loket karcis, dan toilet umum.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) menurut Geroge R. Terry (2006) merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.

Administrator Pelabuhan ialah koordinator bidang perhubungan laut yang berfungsi mengkoordinasikan unit pelaksana badan Usaha Pelabuhan, instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan Kepala Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis instansi pemerintah bidang pemerintah bidang perhubungan laut, di bidang pelabuhan yang tidak diusahakan oleh Badan usaha Pelabuhan.

Dalam pengorganisasian Administrator pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar pelabuhan melaksanakan koordinasi terhadap unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan, instansi pemerintah bidang perhubungan laut dan instansi pemerintah lainnya untuk kelancaran tugas-tugas kepelabuhanan.

Hal ini di sampaikan oleh informan Hal ini di sampaikan oleh informan M.Reza Pahlavi PB selaku Syahbandar menjelaskan bahwa:

“bahwa pelabuhan merupakan mata rantai dan sistem transportasi. Sebagai mata rantai, pelabuhan, baik dilihat dari kinerjanya maupun dari segi biayanya, akan sangat mempengaruhi kegiatan transportasi keseluruhan” (hasil wawancara oleh informan RP 12 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pelabuhan berfungsi sebagai gerbang dari suatu negara atau daerah Pelabuhan sebagai pintu masuk atau pintu keluar barang dari atau ke negara atau daerah tersebut. Dalam hal ini pelabuhan memegang peranan penting bagi perekonomian negara atau suatu daerah.

Dalam melakukan pelayanan organisasi atau pengelola pelabuhan dapat melayani kebutuhan perdagangan internasional dari daerah penyangga (hinterland) tempat pelabuhan tersebut berada, Pelabuhan yang dikelola dengan efisien dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi perdagangan dan perindustrian dari daerah penyangga tempat pelabuhan tersebut berada.

Kegiatan pengorganisasian diawali dengan mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pembagian dan pengelompokan pekerjaan. Pembagian dan pengelompokan pekerjaan haruslah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan mendapatkan hasil yang maksimal. kegiatan pembagian dan pengelompokan pekerjaan

didalamnya terdapat pula kerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu mempermudah mencapai tujuan.

Hal ini di sampaikan oleh informan Kepala Pelabuhan Syamsul Qadri,A.MD selaku Kepala Pelabuhan menyampaikan bahwa:

“dalam melakukan pelayanan harus melibatkan masyarakat dan juga di butuhkan kerja sama yang baik antara pengelola dan masyarakat agar pelabuhan penyebrangan ini tetap dalam proses yang tertip dan aman “(hasil wawancara oleh informan SQ pada tanggal 11 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pelayanan pengelola pelabuhan penyebrangan feri di Pamatata yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu program atau kegiatan yang mendukung pengelola pelabuhan penyebrangan feri di Pamatata berdasarkan usaha-usaha dan kewenangan-kewenangan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk menjalankan program secara mandiri tetapi tetap terawasi, semakin tinggi pula tingkat atau derajat partisipasi masyarakat. Begitu pula sebaliknya, jika pemerintah masih memegang kewenangan penuh dalam menjalankan program dan kegiatan, pertukaran informasi dan interaksi antar masyarakat dan pemangku kepentingan yang rendah, maka tingkat partisipasi masyarakat juga rendah

Berbagai aktivitas di pelabuhan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan kemanfaatan yang tidak sedikit bagi masyarakat, usahawan dan pemerintah. Nilai tambah dan manfaat tersebut dapat berupa jasa, uang, barang, kesejahteraan, dan berbagai manfaat serta

nilai-nilai ekonomis lainnya yang dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh berbagai lapisan dan kelompok stakeholder yang ada, baik yang berada di sekitar lingkungan pelabuhan, maupun di luar lingkungan pelabuhan yang ada.

Adapun hasil wawancara oleh informan selaku Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Selayar menyampaikan bahwa:

“pelabuhan sebenarnya memegang peranan penting dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan perekonomian yang ada di suatu negara. Selain itu, aktivitas di pelabuhan, baik langsung maupun tidak langsung, juga berkaitan dengan berbagai aspek utama pemerintahan, seperti security, authority, transportasi”. (Hasil wawancara oleh informan MN pada tanggal 13 Juni 2023)

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Pada prakteknya, sektor pelabuhan juga berkaitan erat dengan berbagai regulasi internasional yang mengatur mengenai pelayaran dan pelabuhan, seperti konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan IMO (International Maritime Organisation), ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), International Convention for the Safety of Life at Sea (Solus) dan berbagai konvensi internasional dalam bidang perdagangan dan pasar bebas, seperti WTO (World Trade Organisation) dan lainnya. Selain itu secara nasional, pengelolaan pelabuhan juga berkaitan erat dengan berbagai Undang-Undang (UU) lainnya, seperti UU Perikanan, UU Pemerintahan Daerah, UU tentang Pabean, UU Lingkungan Hidup, UU Karantina Perikanan, UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan berbagai undang-undang lainnya. Dengan demikian, pengelolaan pelabuhan pada dasarnya, tidak

hanya berkaitan dengan regulasi yang sifatnya nasional, akan tetapi juga sangat berkaitan dengan berbagai regulasi dan konvensi yang bersifat regional, internasional. Selain itu, pengelolaan pelabuhan tidak hanya semata-mata berkaitan dengan sektor pemerintahan, akan tetapi juga berkaitan dengan berbagai sektor di bidang perekonomian, khususnya perdagangan dan transportasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengelolaan pelabuhan adalah pengelolaan yang sifatnya multi sektoral dan multi dimensional.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan kegiatan melalui komunikasi serta memeberikan motivasi kepada semua anggota yang telah diberi tugas agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan menurut teori menurut Geroge R. Terry (2006) dalam Hasibuan (2006:183) merupakan membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengann perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Tahap pengarahan dalam proses pengelolaan di pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan dapat dilihat mencakup pemberian motivasi, pengembangan potensi, mengupayakan partisipasi.

Proses pelaksanaan pelabuhan diperlukan motivasi supaya masyarakat terus menjaga dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi pelabuhan penyebrangan. pemberian motivasi dalam hal ini sifatnya membangun untuk meningkatkan gairah atau dorongan

kepada masyarakat. Pelaksanaan pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata pemberian motivasi ini sangat penting dilakukan. Mengingat masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan desa wisata tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Hal ini di sampaikan oleh informan Kepala Pelabuhan Syamsul Qadri,A.MD selaku Kepala Pelabuhan menyampaikan bahwa:

“dalam melakukan pengelolaan yang baik maka kami selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada seluruh staf dan karyawan yang bekerja di pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata”. “(hasil wawancara oleh informan SQ pada tanggal 11 Juli 2023)

Hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa motivasi sangat dibutuhkan agar kinerja dari seluruh staf dapat berjalan dengan maksimal. Dan juga pengelolaan pelabuhan pada dasarnya berkaitan dengan berbagai sektor yang ada di suatu negara, dan juga berkaitan dengan berbagai regulasi yang sifatnya regional dan internasional.

Pelaksanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan atau actuating meliputi penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka.

Pengelola Fasilitas mempunyai perencanaan penghematan konsumsi daya listrik dan Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja penggolongan dan pemilahan sampah serta memastikan bahwa sampah

terpilah dilakukan pengolahan secara tepat sesuai jenisnya Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja dan memastikan sampah terangkut Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja dan memastikan tidak ada sampah yang tercecer.

Hal ini di sampaikan oleh informan Hal ini di sampaikan oleh informan M.Reza Pahlavi PB selaku Syahbandar menjelaskan bahwa:

“Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai perilaku penggunaan bahan pembersih sanitasi secara ramah lingkungan dan Tersedianya informasi mengenai bahan pembersih sanitasi yang digunakan ramah lingkungan”. (hasil wawancara oleh informan RP 12 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Bahan pembersih sanitasi adalah material yang digunakan untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan fasilitas publik, seperti, bahan pembersih lantai, bahan pembersih kamar mandi, dll. Hal yang dinilai adalah ketersediaan dokumen yang berisi penetapan dan informasi mengenai bahan sanitasi ramah lingkungan yang ditetapkan oleh pimpinan pengelola. Penetapan bahan sanitasi dapat mengacu pada panduan penerapan.

Mengingat sifat pelabuhan yang merupakan tempat dan aktivitas yang multi dimensional dan multi sektoral, pengelolaan pelabuhan pada saat ini dan di masa depan tidak dapat lagi dibatasi oleh berbagai batas teritorial dan batas-batas sektoral lainnya yang dapat menghambat aktivitas dan pengembangan dari pengelolaan pelabuhan yang bersifat multi sektoral tersebut. Pelabuhan adalah wadah di mana berbagai aktivitas, kepentingan, dan berbagai hal lainnya berlangsung secara global dan dinamis. Oleh karena

itu, setiap pengelola pelabuhan wajib menyadari berbagai faktor tersebut diatas apabila berniat dan beritikad baik untuk mengelola pelabuhan-pelabuhan yang ada. Dengan demikian, pengelolaan pelabuhan pada dasarnya merupakan manajemen dari aktivitas yang dinamis dan berdimensi multi dalam suatu pelabuhan yang mempunyai banyak kepentingan dan berbagi pihak yang berkepentingan (stakeholder) di dalamnya. Oleh karena itu, pengelola pelabuhan berkewajiban mempunyai kemampuan yang professional, qualified dan legitimated dalam mengelola pelabuhan yang ada di Indonesia.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pelabuhan saat ini adalah inti persoalan yang direduksi menjadi konflik kepentingan. Artinya, yang dipermasalahkan seharusnya tidak hanya “siapa yang berhak untuk mengelola pelabuhan”, dan bukan pada pertanyaan tentang “siapa yang lebih mampu mengelola pelabuhan demi kemajuan pembangunan dan pelayanan umum di daerah” atau “mekanisme apa yang paling efektif untuk mengelola pelabuhan itu”. Kondisi ini secara tidak langsung membenarkan anggapan bahwa pangkal dari seluruh sengketa antara Pusat dengan Daerah, tidak lebih dari sekedar rebutan “rejek” belaka. Padahal, manajemen pemerintahan yang ideal adalah sebuah proses yang mengkompromikan antara kepentingan demokratisasi dan pemberdayaan disatu sisi, dengan kepentingan efisiensi disisi lain.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan atau disebut pengendalian merupakan fungsi manajemen berupa mengadakan penelitian, dan jika perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan sesuai tujuan yang telah digariskan semula. Menurut teori menurut Geroge R. Terry (2006) dalam Hasibuan (2006: 242) pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentu, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Pengawasan atau pengendalian dalam proses perencanaan pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat dari standar pengawasan, hambatan, serta upaya mengatasi hambatan yang ada.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen, sangat penting dalam menentukan pelaksanaan proses manajemen. Berdasarkan pengertian tersebut pengawasan dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai cara atau teknik pengendalian yang tepat untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Proses pengawasan juga sangat dibutuhkan standar pengawasan yang jelas, jika tidak ada standar pengawasan maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa saja tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Hal ini di sampaikan oleh informan M.Reza Pahlavi PB selaku Syahbandar menjelaskan bahwa:

“Petugas kesyahbandaran UPP Tual telah menerapkan standar pengawasan keselamatan, keamanan, dan ketertiban penumpang. Sesuai dengan tingkatan organisasi, Pelabuhan Tual adalah pelabuhan yang belum dikomersialkan sehingga dikelola oleh UPP kelas II. Standar pengawasan keselamatan, keamanan dan ketertiban (atau lazim disebut SOP) dalam bentuk hitam di atas putih masih sangat sederhana yaitu berupa Juklak (petunjuk pelaksanaan) yang ditandatangani Kepala UPP. Belum ada SOP yang detail dan disahkan dengan keputusan/peraturan menteri”. (hasil wawancara oleh informan RP 12 Juni 2023)

Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hokum kapal, Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal dan Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Hal ini di sampaikan oleh informan Kepala Pelabuhan Syamsul Qadri,A.MD selaku Kepala Pelabuhan menyampaikan bahwa:

“SOP keselamatan, keamanan, ketertiban UPP Tual ini mampu dijadikan pedoman bagi para petugas lapangan. Demikian juga mitra kerja petugas lapangan UPP seperti dari Polri, juga mematuhi SOP ini. Arus penumpang di Tual diperkirakan masih dalam kisaran 200 penumpang per bulan, itupun mayoritas penduduk lokal. Keakraban antara petugas dengan penumpang sudah terjalin karena seringkali bertemu dengan orang yang sama” (hasil wawancara oleh informan SQ pada tanggal 11 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Tugas dan tanggung jawab seorang syahbandar sangatlah penting dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, ijin berlayar, keselamatan serta keamanan serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut diperairan Indonesia. Tugas dan tanggung jawab dari syahbandar merupakan langkah awal untuk memastikan kelayakan dari kapal yang siap berlayar, hal tersebut sudah merupakan prosedur yang harus dipatuhi dan tidak lepas dari fungsi pengawasannya. Dimana pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari semua kegiatan organisasi untuk melihat sejauhmana pekerjaan yang telah dilakukan dan menilai apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Peranan keberadaan pengawasan sangat penting artinya dalam setiap kehidupan manusia. Sungguh banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang telah disepakati.

Dalam penentuan standar perlu memperhatikan standar fisik dimana ada beberapa ketentuan yang perlu ditetapkan sehingga dapat dikatakan Tingkat kelayakan minimal yang menjadi kelayakan berlayar dasar dalam menilai layak tidaknya kapal bisa berlayar di pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun hasil wawancara oleh informan selaku Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Selayar menyampaikan bahwa:

“masalah standarnya harus pi dilihat baik-baik, kalau kapalku tergantungji kalau ada rusak mesinku, saya sendiri ji perbaiki, apalagi kalau ada bocor badanya ini kapal, lansung di perbaiki ji kalau turunmi air diperbaiki mi kalau sudah itu di cat mi lagi. Sudah itu di periksa lagi tapi jarang ji diperiksa syahbandar” (Hasil wawancara oleh informan MN pada tanggal 13 Juni 2023)

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengawasan harus ada standar yang ditentukan agar dapat meminimalisir atau mencegah adanya kesalahan-kesalahan atau kelalaian dalam artian standar merupakan patokan dalam pengawasan yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan suatu program jika tidak ada standar maka proses pengawasan akan seperti berjalan tanpa arah yang jelas sehingga proses pencapaian tujuan akan sulit untuk dicapai.

C. Pembahasan

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan dari posisi yang diinginkan pada masa depan, sedangkan sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Tujuan dari integrasi system adalah untuk menciptakan proses prediksi demand sumber daya manusia yang muncul dari perencanaan strategis dan operasional secara kuantitatif, dibandingkan dengan prediksi.

Ketersediaan yang berasal dari program-program SDM. Perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu agar tujuan utama dalam memflitasi efektivitas organisasi dapat tercapai. Strategi bisnis pada masa yang akan datang yang dipengaruhi perubahan kondisi lingkungan menuntut manajer untuk mengembangkan program-program yang mampu menterjemahkan current issues dan mendukung rencana bisnis masa depan. Keselarasan antara bisnis dan perencanaan sumber daya manusia dapat membangun perencanaan bisnis yang pada akhirnya menentukan kebutuhan SDM.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Mengenai klasifikasi atau hierarki pelabuhan, sebenarnya PP No. 69/2001 telah membuat pengaturan yang jelas. Disini, pelabuhan dibagi menjadi 3(tiga) jenis, yaitu pelabuhan nasional dan internasional yang dikelola PT Pelindo; pelabuhan regional yang dikelola pemerintah propinsi; dan pelabuhan lokal yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Jika klasifikasi semacam ini dapat dilaksanakan secara konsisten, akan memperjelas pembagian kewenangan dan mekanisme hubungan antara Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Namun dalam prakteknya, tidak ada kriteria yang jelas untuk memasukkan suatu pelabuhan kedalam kategori nasional/internasional, regional, atau lokal.

Sedangkan sejak tahun 1999, dengan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diganti oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelayaran (termasuk pelabuhan) adalah urusan pemerintahan yang dapat ditafsirkan sebagai urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke daerah. Berdasarkan kedua UU Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Pusat hanya berwenang dalam urusan pemerintahan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan agama. Sedangkan urusan-urusan lainnya, termasuk urusan kepelabuhan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelabuhan merupakan bagian dari sektor pelayaran, dan merupakan sektor yang kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini

ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) UU 21/1992 yang menyatakan bahwa pelayaran (termasuk kepelabuhanan) dikuasai oleh negara dan pembinaanya dilakukan oleh pemerintah (pusat). Dalam UU tersebut dirumuskan bahwa pelayaran dalam hal ini dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatannya.

Dengan demikian, pengelolaan pelabuhan pada dasarnya merupakan manajemen dari aktivitas yang dinamis dan berdimensi multi dalam suatu pelabuhan yang mempunyai banyak kepentingan dan berbagi pihak yang berkepentingan (stakeholder) di dalamnya. Oleh karena itu, pengelola pelabuhan berkewajiban mempunyai kemampuan yang professional, qualified dan legitimated dalam mengelola pelabuhan yang ada di Indonesia. Yang perlu dihindari untuk masalah pengelolaan pelabuhan saat ini adalah inti persoalan yang direduksi menjadi konflik kepentingan. Dengan demikian diharapkan dapat menjawab pertanyaan bagaimana pengelolaan pelabuhan oleh Pemda yang sesuai dengan ketentuan UU Pemda dan sekaligus tidak menyalahi aturan internasional .

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pelaksanaan prosedur dalam pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di pelabuhan tuju-tuju kabupaten bone belum berjalan dengan baik, meskipun dalam pengurusan surat-surat izin sudah di penuhi namun dalam pengawasan langsung di lapangan sangat jarang dilakukan. Pelaksanaan standar pengawasan syahbandar dalam

meningkat keamanan dan keselamatan di pelabuhan tuju-tuju kabupaten bone masih kurang optimal karena tidak adanya pengecekan secara langsung dari pihak syahbandar mengenai kondisi kapal, fasilitas kapal hanya mengeluarkan sertifikat tanpa ada pemeriksaann yang akurat. Selain itu ada beberapa pihak yang tidak transparan dalam penggunaan anggaran sehingga tidak terpenuhi standar moneter yang telah di maksudkan.

Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan, dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan, Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan, Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan (*Planning*) perencanaan pengelola pelabuhan penyeberangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan dengan tujuan peyeyanan penyebrangan yang lebih baik dan tertata. Untuk pelabuhan penyeberangan feri, direncanakan penambahan dimensi panjang, hal ini dilakukan untuk menjaga jarak dengan pelabuhan Pamatata yang terlalu dekat dan dapat mengganggu sirkulasi pelayaran untuk penyeberangan
2. Pengorganisasian (*Organizing*) pengelolaan pelabuhan pada dasarnya, tidak hanya berkaitan dengan regulasi yang sifatnya nasional, akan tetapi juga sangat berkaitan dengan berbagai regulasi dan konvensi yang bersifat regional, internasional. Selain itu, pengelolaan pelabuhan tidak hanya semata-mata berkaitan dengan sektor pemerintahan, akan tetapi juga berkaitan dengan berbagai sektor di bidang perekonomian, khususnya perdagangan dan transportasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengelolaan pelabuhan adalah pengelolaan yang sifatnya multi sektoral dan multi dimensional.
3. Pelaksanaan (*Actuating*) bahwa pelaksanaan pengelolaan pelabuhan saat ini adalah inti persoalan yang direduksi menjadi konflik kepentingan. Artinya, yang dipermasalahkan seharusnya tidak hanya “siapa yang berhak untuk mengelola pelabuhan”, dan bukan pada pertanyaan tentang “siapa yang

lebih mampu mengelola pelabuhan demi kemajuan pembangunan dan pelayanan umum di daerah” atau “mekanisme apa yang paling efektif untuk mengelola pelabuhan itu”.

4. Pengawasan (*Controlling*) Pelaksanaan pengawasan harus ada standar yang ditentukan agar dapat meminimalisir atau mencegah adanya kesalahan-kesalahan atau kelalaian dalam artian standar merupakan patokan dalam pengawasan yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan suatu program jika tidak ada standar maka proses pengawasan akan seperti berjalan tanpa arah yang jelas sehingga proses pencapaian tujuan akan sulit untuk dicapai.

B. Saran

1. Perlu adanya perubahan terhadap UU Pelayaran dan tentu saja harus diikuti dengan perubahan peraturan pelaksana di bawahnya, seperti PP No.69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan, yang secara konkrit dapat dilaksanakan dalam praktek.
2. Syahbandar saat melakukan pengawasan seharusnya berpacu pada SOP yang ada dan melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Selanjutnya saat melakukan pengawasan dilapangan hendaknya membawa lembar ceklis dan mengisinya sesuai dengan fakta dan realita yang ada
3. Diharapkan agar ketelitian pengawasan lebih ditingkatkan baik pada sub indikator kedisiplinan maupun pada tingkat fokus pengawasan terutama dalam penginputan data agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya pihak syahbandar harusnya lebih tegas dan teliti apabila menghadapi permintaan perubahan data yang tidak signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., & Dwiastuti, I. (2015). Membangun poros maritim melalui pelabuhan. *Masyarakat Indonesia*, 41(2), 163–176.
- Apriani, D. D., Perdana, F. W., Irwan, H., & Setiawan, B. (2021). Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1682–1690.
- Balfas, H. M. (2016). Kajian Atas Privatisasi Pelabuhan Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(3), 243–265.
- Hutasoit, I. (2020). Tanggung jawab direktorat jenderal perhubungan laut dalam melakukan pengawasan serta pencegahan kecelakaan dalam pengangkutan laut. *Petita*, 2(2), 299–317.
- Lapu, N. (2022). *Kajian Kinerja Pelabuhan Penyeberangan Pamatata Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan= Performance Study of Pamatata Ferry Port in Selayar Islands Regency, South Sulawesi*. Universitas Hasanuddin.
- Lasse, D. A. (2016). Manajemen Kepelabuhan (Edisi Kedua). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lestari, R., Djusfi, A. R., & Thariq, P. A. (2020). Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengelolaan Dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(1).
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 102–107.
- Muzwardi, A. (2016). Analisis Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KBPBB) Batam. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 31–38.
- Nasional, D. P. (2019). *Kamus besar bahasa Indonesia*.
- Prihartanto, W. A. (2014). Operasi Terminal Pelabuhan. Surabaya: Pelabuhan Indonesia III.
- Purbani, D., & Aisyah, A. (2019). Konsep Eco fishing port berbasis Kualitas Air dalam Pengelolaan Pelabuhan: Studi Kasus PPI Barek Motor, Kabupaten Bintan. *Jurnal Segara*, 15(3), 127–138.
- Redita, W., Prakoso, L. Y., & Hipdizah, H. (2020). Implementasi Kebijakan Vessel Traffic Services Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Di Selat Sunda Dalam Keselamatan Pelayaran Terhadap Strategi Pertahanan Laut. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(1).
- Sobur, A. (2001). *Etika Pers: profesionalisme dengan nurani*. Humaniora Utama Press.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif

dan R&D. In *METODE PENELITIAN ILMIAH*.

- Terry, G. R. (2006). *Asas-asas Manajemen*, diterjemahkan oleh Winardi. *Bandung, Alumni*.
- Wahyudi, A., Lubis, E., & Pane, A. B. (2017). Strategi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Pelabuhan Perikanan: Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 1(2), 139–152.
- Wignjosoebroto, S. (1999). Perspektif Pembangunan Daya Saing Global. *Tenaga Kerja Profesional Simposium (Desember)*, Jakarta.
- Wood, J. C., & Wood, M. C. (2002). *Henri Fayol: Critical evaluations in business and management* (Vol. 2). Taylor & Francis.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.



L

A

M

P

I

R

A

N





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066922 Fax (0411) 865388 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1461/05/C.4-VIII/V/1444/2023

20 Syawal 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

10 May 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0644/FSP/A.6-VIII/V/1444 H/2023 M tanggal 9 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NUR HIDAYATUL FITRI

No. Stambuk : 10561 1120819

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PROFESIONALITAS PENGELOLAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN FERI DI PAMATATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Mei 2023 s/d 13 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumulahu khaeran.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. H. Abubakar Idhan, MP.

NIM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bugeperwih No.5 Telp. (0411) 441077 Faks. (0411) 448398
 Website : <http://dmp-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 18371/IS.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
 Lampiran : * Bupati Kep. Selayar
 Perihal : Izin penelitian

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1481/05/C.4-VIII/W/1444/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NUR HIDAYATUL FITRI
 Nomor Pokok : 10561120919
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/instansi saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI,
 dengan judul :

**" PROFESIONALITAS PENGELOLA PELABUHAN PENYEBERANGAN FERI DI PAMATATA
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tol. 13 Mei s/d 13 Juni 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar
 Pada Tanggal 12 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar dan Makasar
 2. Peringgal


PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung MPP Jln. Ahmad Yani Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
 Telepon (0414) 21083, email: pmptanselayar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 0625/ Penelitian/V/2023/DIS PMPTSP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama Peneliti : NUR HIDAYATUL FITRI
Alamat Peneliti : Dusun Tinggi Sisa Desa Tanete Kec. Bontomatene
Nama Penanggung Jawab : -
Anggota Peneliti :

Untuk melakukan penelitian dalam rangka "Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pengelola pelabuhan penyebrangan feri di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar" di :

Lokasi Penelitian	Pelabuhan Pamatata
Judul Penelitian	Profesionalitas Pengelola Pelabuhan Penyebrangan Feri Di Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar
Lama Penelitian	1 Bulan
Bidang Penelitian	Transportasi Darat
Status Penelitian	Perorangan

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2023



Dikeluarkan : Benteng
 Pada Tanggal : 15 Mei 2023

A.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
KEPALA DINAS



 Pemerintah Kabupaten
 Kepulauan Selayar

Des. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si
 NIP. 19660507 198603 1 022

Rp. 0,-
 Tembusan

1. Kepala Badan Kesbangpol di Benteng
2. Arsip





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 863388

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Hidayatul Fitri
Nim : 105611120819
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 08 Agustus 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Kusumah S.Hum. M.I.P.
NIM. 964 591

Bab I Nur hidayatul fitri 105611120819

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

2%

2

ejournal.poltek-amimedan.ac.id

Internet Source

2%

3

www.kompasiana.com

Internet Source

2%

4

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang

Student Paper

2%

5

Submitted to Universitas Terbuka

Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Bab II Nur hidayatul fitri 105611120819

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	9%
2	repository.stimart-amni.ac.id Internet Source	3%
3	repository.unimar-amet.ac.id Internet Source	2%
4	vdocuments.net Internet Source	1%
5	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	1%
7	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
8	lambeturah.id Internet Source	1%
9	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%

Bab III Nur hidayatul fitri 105611120819

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Kusnanto Kusnanto, Amrazi Zaks, Rustiyarso Rustiyarso. "PERUBAHAN MIKRO SOSIAL TRADISI PANGGARI PADA MASYARAKAT DAYAK BANYADU DI DESA LINTANG KABUPATEN LANDAK", Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK), 2020 Publication	2%
2	docobook.com Internet Source	2%
3	id.scribd.com Internet Source	2%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
6	repository.upi.edu Internet Source	2%

Bab IV Nur hidayatul fitri 105611120819

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
4	id.wikipedia.org Internet Source	2%
5	fisip.moestopo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Bab V Nur hidayatul fitri 105611120819

ORIGINALITY REPORT

5%
SIMILARITY INDEX

5%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%
★ core.ac.uk
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude references On



Dokumenetasi

1. Wawancara Bersama Bapak Pelabuhan



2. Wawancara Bersama Bapak Kepala Dinas Perhungan



3. Wawancara Bersama Bapak Syahbandar



RIWAYAT HIDUP



RIWAYAT Nur Hidayatul Fitri. Lahir pada tanggal 05 Oktober 2001 , di Desa Tanete Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Penulis Merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Patta Parang dan Ibu Andi parang. Hal Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK RAUDHATUL ATHFAL pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Inpres Barro dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Bontomatene dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat , penulis melanjutkan ke SMA NEGERI 2 SELAYAR dan tamat pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2023 Penulis mendapatkan gelar S1 pada program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan Judul Profesionalitas Pengelola Pelabuhan Penyeberangan Ferry di Kabupaten Kepulauan Selayar. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.

